

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Anggaran KJP Plus Dialihkan untuk Sekolah Swasta Gratis

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengalihkan Anggaran Belanja Pendapatan Daeral (APBD) KJP Plus untuk membuat sekolah swasta gratis.

Kebijakan tersebut agar seluruh siswa di Jakarta bisa mendapatkan pendidikan sampai lulus Sekolah Menengah Atas atau SMA.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus banyak masalah karena tidak tepat sasaran.

Dia juga melihat, banyak para orang tua ada yang menggunakan dana KJP Plus saat cair bukan untuk kebutuhan sekolah anaknya. "Jadi harus ada pengawasan dan bukti dari orang tua kalau anggaran tersebut dipakai untuk kebutuhan pendidikan," terangnya, Rabu (21/8/2024).

Trubus melanjutkan, KJP Plus perlu dilanjutkan, tetapi Pemprov Jakarta harus melakukan evaluasi secara ketat agar dana yang mereka keluarkan tepat sasaran.

Trubus juga berpesan agar Pemprov Jakarta mengutamakan sekolah swasta yang tidak mampu dan bagi sekolah swasta yang mampu jangan dibuat gratis.

"Kalau yang sekolah gratis seperti yayasan tidak mampu, sekolah apa adanya. Kalau sekolahnya seperti labschool ya jangan digratiskan karena tujuan mereka cari cuan," tegasnya.

Makanya, Trubus setuju bila Pemprov Jakarta menganggarkan dana KJP Plus atau tidak menghilangkannya meski ada kebijakan sekolah swasta gratis.

"Atau anggaran KJP Plus itu dialihkan ke sekolah swasta gratis gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta bakal membuat seluruh sekolah swasta di Jakarta gratis demi meringankan beban orang tua warga Jakarta.

Pelaksana tugas Kepala Disdik Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pekan ini dia bakal memaparkan sekolah swasta yang akan digratiskan ke Komisi E DPRD Jakarta.

"Jadi gimani kalo di dalam Mahkamah Konstitusi kemarin menyatakan bahwa sekolah gratis ini wajib kan seperti itu yah," kata Budi Awaluddin, Selasa (20/8/2024)

Dia menambahkan, "Ngambil dananya darimana? Dari anggaran 20 persen itu dulu yg didahulukan. Jadi yang didahulukan sekolah gratisnya dari anggaran 20 persen kalo sekarang di DKI 25 persen."

Jika anggaran 25 persen Disdik Jakarta mencukupi untuk menyalurkan dana sekolah swasta gratis, maka pihaknya akan menjalani program pendidikan lainnya.

Misalnya, memberikan dan lainnya supaya anak-anak bisa sekolah dengan layak tanpa memikirkan biaya.

"Nah, baru kalo itu sudah tercukupi, bisa melakukan kegiatan lainnya, program lainnya seperti itu, jadi kita mendahulukan itu nanti program (sekolah gratis itu)," jelasnya. (m26)